

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM, 2011.
- Algra, N. E., dkk. *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Ali, Achmad, *Dari Formal Legalistik Ke Delegalisasi : Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
-, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002.
-, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2009.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/74*, Jakarta: Dian Rakyat, Cet 1, 1986.
- Badriyah, Siti Malikhatusun, *Sistim Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiardjo, Miriam, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung : Mizan Pustaka, 1998.
- Carm. O, *Piet Go Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*, Malang: DIOMA, 1987.
- Campbell, Tom. *Seven Theories of Human Society*, (terjemahan) oleh F. Budi Hardiman . Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Crus. de., Peter, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*, Bandung : Nusa Media. 2010.

- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003.
- Darmodiharjo, Dardji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Darmodiharjo Darji dan Sidharta *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia) Cet, IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Dimiyati, Khudzaifah, *Pemikiran Hukum Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta, 2014.
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of The Religious Life*, 2011 Yogyakarta: IRCiSoD, Terjemahan, Cetakan Pertama.
- Farida Indrati P., Maria , *Ilmu Perundang - Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius. 2007.
- Gerardette, Philips, *Melampaui Pluralisme, Integritas Terbuka sebagai Pendekatan yang Sesuai bagi Dialog Muslim –Kristen*, Malang: MADANI bekerja sama dengan The Asia Foundation -Indonesia dan PUSAM UMM Malang, 2016.
- Hadiwardoyo, Al, *Purwa Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.
- Hukumonline, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama menurut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Literati dan hukumonline.com. 2014.
- Indrayanti, Kadek Wiwik. & R Entah, Aloysius, *Peran Dinas Kantor Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama : Studi di Kota Malang dan Denpasar Bali* . Malang: Universitas Merdeka, Hasil penelitian, 2013.
- Iskandar, Pranoto, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar*, The Institute for Migrant Rights (IMR), 2012.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- Jakarta: mitra Wacana Media, 2015.
- Kamal Zainu, *Menafsir Kembali Perkawinan Antar Umat Beragama, dalam Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal dan NZAID, 2004
- Karsayuda. M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai- Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kurnia, Tinton Slamet, *Konstitusi HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Khanif, AL., *Hukum HAM dan Kebebasan Beragama*, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2012.
- Lindholm Tore Dkk (ed), *Terjemahan oleh Bosko Rafael Edy dan Abduh Rifa'i. Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-prinsip dan Praktik*, Yogyakarta: Kanisus. 2010.
- Marzuki Machmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mahfud, MD, Moch, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT Rajawali Pers. 2012.
- Mariana, Ga, Ester, *Perempuan, perkawinan, dan Agama-Agama: Melintas Batas, dalam Tafsir Ulang Perkawinan Beda Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- Malik, A. Toha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif. Cet 1, 2005.
- Manan, Bagir, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Bandung : PSKN FH UNPAD, 2011.
- . *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2009.
- Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Edisi terjemahan : Arief Sidharta, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Menski, Werner, *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Bandung: Nusa Media, Edisi terjemahan, Cet I, Januari 2012.

- Monib, Mochamad dan Nurcholish, Achmad. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, Sudikno Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muhshi, A, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia Atas kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Mujtaj Majda, El, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Nawarko Dwi dan Suyatno Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: kencana. 2004.
- Nasution, Bhader. *Negara Hukum*. Bandung: C.V. Mandar Maju, 2011.
- Nawawi, *Perkawinan Campuran : Problematika dan Solusi, Palembang : Diklat Keagamaan Palembang, Widyaiswara Madya*.
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971.
- Nonet, P and Selznick, P, *Law & Society in Transssition Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row Publiser), 1978
- Nurcholis, A dan Baso, A, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Nurjaya, I Nyoman, *Antropologi Hukum: Tema Kajian, Metodologi, dan Penggunaannya Untuk Memahami Fenomean Kemajemukan Hukum di Indonesia*, Makalah dipresentasikan dalam Kuliah tamu di Universitas Brawijaya 6 April 2013.
- Prawirihamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, Cetakan II, 1994.
- Prodjodikoro , Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising. 2010.
-, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI PRESS. 2006.
-, *Kepastian Hukum dalam Kumpulan Tulisan*, Bahan Bacaan Kuliah

- Mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Undip. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
-, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili dan Putra I.B., Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rudaskarya, 1993.
- Rasjidi, Lili, *Aneka Hukum Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Alumni, 1982.
- Rohidin, *Konstruksi Baru Kebebasan Beragama Menghadirkan Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Negara Hukum Indonesia*, Yogyakarta- FH UII Pers. 2015.
- Rozak Abdul, A, Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama: Perbandingan Beberapa Agama*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2001.
- Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung : Pionir Jaya. 1986.
- Salim dan Erli, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada. 2014.
- Syihab Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996.
- (ed), *Encyclopedi Al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Jakarta: Bimantra, 1997.
- Sidharta, Arief, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Indonesia*, Desertasi, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahayangan. 2004.
- Sukerti, Ni Nyoman, *Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis*, Denpasar : Udayana University Press, 2012.
- Suratman dan Philip, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit ALBABETA, 2012.
- Suseno, F., Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001
- Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sutiyono, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Risalah Panitia Khusus RUU tentang Perkawinan, Nomor 14 A, Tahun sidang 1972/1973.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman .

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Penjelasan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keputusan Hakim

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor.1400/1986/1989. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Keputusan Nomor 136/Pdt.P/2009/PN. DPS Keputusan Nomor 527/Pdt/P/2009/P.N. Bgr.

Konvensi Internasional :

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) 1948. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979.

Jurnal

Andriaan Bedner and Stijn van Huis, *Plurality of MARRIGES Law and Marriage Registration for Muslim In Indonesia: A Plea for Registration*. [Http://www.utrechlawreview.org](http://www.utrechlawreview.org). Vol 6, Issue 2 (june). 2010.

Arief Sidharta, B, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Majalah Hukum: Pro Justitia, Tahun XII, No 1, Januari 1994

Achmad Nurcholish, *Interfaith Marriage in The Constitution and Islamic*

Law Dinamic in Indonesia, Al-Mawarid journal of Islamic Law, Vol.xv. No. 1, August 2015.

Bambang Santoso, Relevansi Pemikiran Teori Robert B. Siedmen tentang *The Law of Non Transferable of the Law* dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Yustisia Nomor 70, Januari - April 2007.

Barwick, The Commonwealth Mariage Act 1961, *Melbourne University Law Review*, Vol.3, 1961-1962

Danu Aris Setiyanto, 2016, Interfaith Marriage after Constitutional Court's Number XII/2014 On Human Rights Perspective <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/>). Vo. 19 No. 1.

Faiq Tobroni, 2015, *Freedom of Ijtihad on Interfaith Marriage After Constitutional Court's Decision* (<http://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/81>), Vol 12, No 3.

Gr. Van der Brught & J.D.C. Winkelman, *Penyelesaian Kasus*, terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro. Yustitia, Tahun XII, No. 1, Januari 1994.

Indrayanti, K. W dan Entah, A.R. Kajian Perkembangan Peran Negara dalam Memberikan Penetapan Perkawinan bagi Calon Pasangan Beda Agama di Indonesia. *Cakrawala Hukum* Vol 6, No 1, Juni 2015.

Leeman, Alex. B, *Interfaith Marriage in Islam: An Examination of the Legal Theory Behind the Traditional and Reformist Positions*. USA: *Indiana Law Journal*: Vol.84: Iss.2, Article 9, 2009

Meuwissen, D.H.M, *Pengembangan Hukum*. *Majalah Hukum: Pro Justitia* Tahun ke XII, Nomor 1, Januari 1994.

Nurjaya, I. Nyoman. *Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultur: Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Hukum progresif*, Vol .3, No. 2, Oktober 2007.

Website

www.Achmadsamantha.wordpress.com/2013/Nama-Agama-Agama-Asli-Nusantara. Diunduh 3 mei 2015

Mochamad Shofan dalam Triyas Hadi Prihantono, *Keberagaman dan Toleransi*. (Media Keberagaman. Com), 2011.

www. Encyclopida.com. *Interfaith Marriage*, diunduh tgl 8 April 2016.
[http://Interfaithmarriage.blogspot.co.id./2016/03/ Interfaith Marriages on Race in the United States](http://Interfaithmarriage.blogspot.co.id./2016/03/InterfaithMarriagesonRaceintheUnitedStates). Diunduh 8 April 2016

www.bangdenjambi.wordpresscom, *Perkawinan Beda agama dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Arsip Mei 2009. Diunduh 3 Mei 2016

Juswono Hudowo, dan Indra Warga Dalem, *Tiga Pandangan tentang Kawin Beda Agama*. Diunduh pada 15 Juni 2015

Della Sri Wahyuni dalam [http://leid.or.id/Pluralisme Hukum](http://leid.or.id/PluralismeHukum) dalam *Pembangunan Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan*.

Tiar Ramon, *Kekosongan Hukum*, diunduh 23 Juni 2016 [www.edu.academia.edu/3797838/ Sejarah hukum Perkawinan di Indonesia](http://www.edu.academia.edu/3797838/SejarahhukumPerkawinandiIndonesia)

Sefarina Shinta Dewi, [www.kumham-jogya.info/karya ilmiah/37-kajian ilmiah lainnya/381- Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](http://www.kumham-jogya.info/karyailmiah/37-kajianilmiahlainnya/381-PembentukanUndang-UndangNomor1Tahun1974TentangPerkawinan). Diunduh 13 Januari 2016.

[www.hma89.weebly.com/1/post/2020/02, Agama dalam Kajian Esoteris dan Eksoteris](http://www.hma89.weebly.com/1/post/2020/02,AgamaDalamKajianEsoterisdanEksoteris).

[https:// amgy.word press.com/2008/02/08, Adeng Muchtar Ghazali, Plularisme dan Titik temu Agama-Agama](https://amgy.wordpress.com/2008/02/08,AdengMughtarGhazali,PlularismeDanTitikTemuAgama-Agama). (Artikel Dosen UIN), diunduh 2 Juni 2016.

Disertasi

Ichtijanto, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia Tahun 1993*. Penerbit: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2003.

Trisaningsih, Murdiati, *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: C.V. Utomo, 2007

Sirwan Dahwal, 2010, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986-2010)*. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

INDEKS

A

a quo, 203

Abdul Hakim Garuda Nusantara,
101

Aborigin, 218, 220

Aboriginal Ordinance 1918, 219

abstrak, 59

acuan; — moral, 61; — tingkah
laku, 122

adat, 13; — Karuhun Sunda, 107

administrasi, 204; — Kependu-
dikan, 38, 210, 264; — negara,
216

*African Charter on Human and
Peoples Rights*, 73

agama, 4, 5, 8, 13, 18, 74, 79, 107,
135, 262; — Budha, 9; — dan
kepercayaan, 9; — Katolik,
144; — samawi, 135

Ahli Kitab, 137

ajaran agama, 23, 204, 206

ajaran prioritas baku, 50

Aksiologi perkawinan, 126

aksiologis, 123

akte perkawinan, 174

aliran; — Etis, 58; — kepercayaan,
6; — Liberalisme, 72; —
yuridis dogmatik, 47

an established way of acting, 65

an sich, 61

anak hukum, 66

Anglo Saxon, 92

argumen ilmiah, 24

argumentum a-contrario, 92, 93

argumentum per analogian, 93, 250

Aritoteles, 56

Arsa wiwaha, 129

artikulasi politik, 104

asas; — kebangsaan, 101; — kebe-
basan beragama, 14; — kema-
nusiaan, 101; — pembentukan
peraturan, 101

Aspek; — aksiologi, 26; — aksiologi perkawinan, 125; — epistemologi, 25; — faktual, 104; — *forum externum*, 253; — *forum internum*, 253; — kehidupan, 20; — kehidupan manusia, 122; — kepastian hukum, 231; — ontologi, 24; — Ontologis perkawinan, 123; — pencatatan, 233

Asuri wiwaha, 129

aturan hukum, 50, 89

B

badan; — hukum publik, 196; — legislatif, 104; — hukum primer, 40; — hukum sekunder, 39

bahan; — rujukan, 209; — sekunder, 40

Basic Norm, 85

bastion, 53

belief framework, 100

belief in teaching, 166

beragam penafsiran, 11, 16

berdimensi teologis, 246

berjalan wajar, 144

berkonflik, 11

bernaluri biologis, 2

bersifat subjektif, 102

bersikap jujur, 2

Bhinneka Tunggal Ika, 1, 4, 5, 101

Bingkai Pancasila, 60

Brahma wiwaha, 129

budaya hukum, 163

C

cabang filsafat, 125

calon pasangan, 7, 18, 19, 27, 38, 64, 148, 156, 162, 203, 208

calon pasangan kawin beda agama, 19

calon suami, 12

case approach, 37

causal verband, 198

cinta kasih sejati, 144

cita hukum, 21, 99

civil law, 227

civil married, 12

Committe National Council on Islamic Affairs, 220

common law, 215, 216, 219, 227

comparative approach, 37

concurring opinion, 205

cultural relativism, 238

customary law, 47

D

dasar; — hukum, 48; — rujukan, 22

de logische arbeid, 94

definisi politik, 81

demokrasi, 99

Den Haag, 108

Departemen Sosial, 116
development, 80
Dewa wiwaha, 129
dewan rakyat, 116
dharma, 106, 128
die Sicherheit durch das Recht, 49
Dinas Kantor Catatan Sipil, 16
disertasi hukum, 39
diskriminasi, 266
diskriminatif, 23, 34; — gender,
144
disparitas cultus, 145
doktrin; — etika, 62; — Indone-
sia, 61

E

eksekusi, 243
entitlement, 70
epistemologis, 123
equal, 73
Equality in rights, 57
equel, 172
era global, 232
Eropa Kontinental, 93
etika, 2; — global, 240
external religion, 159

F

failure state, 65
faktor sosio-kultural, 46
falsafah negara, 240
fenomena dalam Islam, 160

fenomena sosial, 4
fenomenologis, 4
fikih klasik, 115
filosofische Geltung, 53
filsafat perennial, 245
folk law, 45
folkways, 122
founding father, 241
Fraksi ABRI, 112
free will, 8
Friedman, 57
Frithjof Schuon, 158
Fuller, 51
fundamental, 124
fundamental law, 22, 83
fungsi; — dan tujuan hukum, 34;
— konstitusi, 21; — negara,
33; — pemberian, 81; —
regulatif, 85

G

Gandharwa wiwaha, 129
Geltung des positiven Recht, 52
generasi manusia, 127
gentleman agreement, 60
genuine enggament, 5
Gereja di Indonesia, 199
gesetzliches Recht, 51
giving each man his due, 55
globalisasi, 24
golongan; — penduduk, 120; —
pribumi, 113

gotong royong, 60

Griffiths, 43

grondrechten, 80

Grundnorm, 85

Gryhasta Asrama, 106, 128

Gustav Rudbruch, 50

H

hak, 7; — Asasi Manusia, 70, 81,

169, 231, 234, 237; — individu,

69; — kebebasan, 69, 80; —

kehidupan ekonomi, 69; —

konstitusional, 200; — orang

tua dan wali, 236; — politik,

69; — prosedural, 69; — rak-

yat, 75; — yang kodrati, 6

hakikat; — nilai perkawinan, 25;

— perkawinan, 27, 34, 127

hakim, 20

Hakim Konstitusi, 175

Hans Kelsen, 98

hasil penelitian, 10

Hedonistik Calculus, 63

Herman S Endro, 149

hermeneutika, 89

hidup beragama, 99

higher law, 22, 83

Himpunan Mahasiswa Islam, 117

historical approach, 37

Hobbes, 72

Hooker, 109

hubungan, 1; — antar manusia, 1;

— antara tradisi, 4

hukum, 6, 10, 25, 29, 55, 70, 215,

237; — adat, 12; — agama, 18;

— dasar, 97; — Islam, 187; —

kodrat, 80; — modern, 48, 49;

— negara, 44; — perkawinan,

29, 111, 116, 162, 218; — positif,

6, 15, 21, 80, 82; — represif,

86; — tertier, 40; — yang ma-

jemuk, 46

I

Ideological Concepts, 79

ijtihad fardiy, 207

ikatan; — lahir batin, 7; — perka-

winan, 1

impartiality, 58

Implikasi Yuridis, 171

Indische Staats Regeling, 113

individu, 2

individulistik, 102

industrionus, 218

inspraak, 86

instance of reflection, 81

Instansi Pelaksana, 169

interaksi sosial, 3

interfaith marriages, 167, 221

International Conference Religion and

Peace, 39

International Covenant on Civil and

Political Rights, 39

interpretasi otentik, 88

Islam, 10, 37
isu hukum, 42

J

Jaman Kolonial, 114
Jeremy Bentham, 173
Jhon Sturat Mill, 56
Johan Galtung, 21
jumhur, 140
justice as fairness, 57

K

kaidah; — agama, 151; — hukum, 96
kajian; — epistemik, 125; — pluralisme hukum, 43
kamus hukum, 39
Kantor Urusan Agama, 191
karakteristik nilai, 121
Kartu Tanda Penduduk, 18
keadilan, 54; — komutatif, 172; — masyarakat, 104; — Pancasila, 59; — sosial, 61; — substantif, 258
keamanan publik, 237
kebebasan; — asasi manusia, 84; — beragama, 26, 234; — eksternal, 236; — internal, 236; — korporat dan kedudukan hukum, 237
keberagaman; — agama, 5; — hukum adat, 6; — kepercayaan, 5

kebijaksanaan, 81
kebudayaan, 74
kebutuhan masyarakat, 209
kehadiran negara, 20
kehidupan; — bermasyarakat, 200, 209; — kenegaraan, 115; — masyarakat, 246; — warga negara, 22
kekosongan; — hukum, 28, 96; — norma, 171; — Norma Hukum, 91
kekuasaan negara, 23
kelompok; — agama, 8; — ahl kitab, 220; — masyarakat, 102; — Pemerintah, 112; — tradisional, 142; — umat Islam, 113
keluarga, 23
kemajemukan sistem hukum, 25
kepastian hukum, 47, 48, 50, 52, 53, 172, 201, 204, 254, 266
kepentingan agama, 115
kepercayaan, 7
kepribadian unik, 1
Keputusan Mahkamah Mahkamah Agung, 14
kerugian konstitusional, 198
keseimbangan Pancasila, 256
kesepakatan, 24
keterkaitan hakikat, 26
keterlibatan tiga pihak, 22
Ketetapan MPR, 97

ketidakpastian hukum, 10
 Ketuhanan Yang Maha Esa, 123,
 200, 243
 kewajiban negara, 173
 kewenangan atribut, 21, 83
 kewenangan konstitusional, 196
 komunitas; — manusia, 4; —
 masyarakat, 216
 konflik horizontal, 244
 Kong Fu Chu, 107
 kongres perempuan Indonesia,
 116
 Koninklijk Besluit, 13
 Konsekuensi logis, 240
 konsep; — hukum, 80; — perka-
 winan, 26; — perlindungan
 hukum, 257; — pluralisme,
 246; — pluralisme hukum, 45,
 47; — Prioritas Kasuistik, 51
 konstitusi, 7, 83
 konstruksi hukum, 94
 konteks; — sejarah, 22; — teo-
 logis, 240
 Kovenan Internasional, 77
 kredo ontologi, 241
 kultur hukum, 59

L

Landasan epistemologis, 125
law making, 100
Lebens philosophie, 60
legal centralism, 44
legal culture, 46
legal drafting, 266
legal gap, 250
legal issue, 39
legal norms, 47
legal pluralism, 42, 44, 45, 247
legal positivism, 47
*legal protection of individual in rela-
 tion to acts*, 86, 105
legal reform, 29
Legal Standing, 195
 legislasi, 243
 legitimasi, 149
legitimite, 67
 Leif Wenar, 65
 lembaga negara, 97
 Lembaga Pembinaan Hukum
 Nasional, 117
lex Injusta non est lex, 55
liberty, 73
library research, 39
 Lili Rasjidi, 86
 literatur Inggris, 54
living law, 247

M

Magna Carta, 74
 Magnis Suseno, 59
 Mahkamah Agung, 15, 20
mainstream, 140, 161
 Majelis Ulama Indonesia, 191
 Majelis Umum, 75

- makhluk sosial, 1
 makna keadilan, 102
 Maria Ulfa Subadio, 113
 Masa Orde Baru, 115
 Masa Paska Kemerdekaan, 115
 Masaji Chiba, 45
 masalah moral, 126
 Masyarakat, 47
 masyarakat, 3, 4, 23, 160, 231; —
 Barat, 45; — demokratis, 201;
 — Indonesia, 23, 162
 Maurice Cranton, 80
mawaddah wa rachmah, 134
 mayoritas, 160
mechanism interchange, 230
 mekanisme pengaturan lokal, 44
 melangsungkan perkawinan, 17
 memberikan keterangan, 186
 memiliki kepentingan, 112
 memperoleh keturunan, 23
 mencapai keadilan, 105
 menemukan konsep, 41
 menentukan isi hukum, 49
 mengalami perubahan, 6
 menganalisis masalah, 41
 menjamin kepastian hukum, 20
mensenrechten, 80
 Menurut agama Katolik, 9
 Menurut Hindu, 9
 menyelesaikan masalah, 91
 merawat kehidupan bermasyarakat,
 61
 merusak integritas sistem, 52
 metode; — *a contrario*, 93; — argu-
 mentasi, 94; — berpikir ana-
 logi, 93; — eksposisi, 94; —
 interpretasi, 94; — konstruksi,
 40; — penemuan hukum, 89, 93
 Meuwissen, 81
 minimum pendidikan, 69
 Model paradigma, 240
 Montesquieu, 72
mufassirin, 136
 multikultur, 4, 155
 Muslim, 138
 Musyawarah Nasional
 Kesejahteraan Keluarga, 116
- N**
- nation*, 99
natural law, 247
natural rights, 73, 79, 80
 negara; — agama, 100; — hukum,
 97; — teokrasi, 18
niewe conclusies, 94
 nilai; — hukum, 81; — instrumen-
 tal, 122; — intrisik, 122; — Pan-
 casila, 232; — perkawinan, 2,
 26, 123, 156, 262; — sektarian,
 100
 nomokrasi, 99
non derogable rights, 167
 norma, 23, 125, 266; — hukum, 98,
 171; — perkawinan, 213

normatif, empiris dan filsufis, 46

O

objek sistem hukum, 70

ontologi, 125

Ordonansi Perkawinan Indonesia

Kristen, 15

originality, 33

P

Paisaca wiwaha, 129

Pancasila, 21, 60, 127, 240, 256

Pandangan agama, 163

Paradigma; — Integralistik, 239;

— Sekularistik, 239; — Simbiotik, 239

Parlemen, 96

Patrick Wilson, 75

patrilineal, 206

pawiwahan, 128

pegawai catatan sipil, 16

pelaksanaan perkawinan, 17

Pemahaman Hak Asasi Manusia, 68

pemahaman holistik, 128

pembangunan, 80

pembentukan konsep norma, 210

Pembukaan UUD 1945, 200

Pemerintah lokal, 221

pemikiran mayoritas sarjana hukum, 112

penafsiran mengenai hukum agama, 8

pencari keadilan, 88

pencatatan perkawinan, 24

penciptaan hukum, 16

pendekatan filosofis, 258

pendekatan sejarah, 37

peneliti hukum, 87

penemuan hukum, 87, 88, 93, 210

penerap hukum, 50

penetapan; — pengadilan, 190, 210; — perkawinan, 175

pengadilan, 208

Pengadilan Negeri Denpasar, 38

pengakuan; — negara, 44; — rakyat, 21

Penghakiman, 197

penyelundupan hukum, 10, 19, 153

Peran negara, 172

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 97

Peraturan Daerah Provinsi, 97

peraturan internasional, 34

Peraturan Pemerintah, 97

peraturan perkawinan, 214

Peraturan Perundang-undangan, 97

Peraturan Presiden, 97

perbedaan; — agama, 14; — kewarganegaraan, 108; — keyakinan agama, 192

perekonomian subsistem, 48

perempuan dewasa, 166

perennialisme, 245

perjanjian; — internasional, 78; —
 untuk saling setia, 2

perkawinan, 2, 128, 141, 200, 204;
 — beda agama, 3, 7, 8, 10, 16,
 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29,
 34, 40, 83, 108, 121, 153, 163,
 179, 188, 211, 230, 231, 234,
 246, 263, 265, 266; — campur-
 an, 3, 13; — dan keluarga, 8;
 — Islam, 12

perkembangan masyarakat, 195

perlindungan; — hak asasi manu-
 sia, 34; — hukum, 28, 29, 34,
 105, 263

permohonan calon pasangan, 208

pernikahan beda agama, 139

perputaran ekonomi, 48

persatuan Indonesia, 61

persentase perkawinan
 campuran, 220

Perserikatan Bangsa-Bangsa, 71

persoalan masyarakat, 157

personal and societal forces, 209

pertimbangan; — hakim, 15; —
 hukum, 38

perubahan sosial, 216

Philipus Hadjon, 85, 86

pindah agama, 7

Pluralisme, 4, 160

pluralisme hukum, 29, 36, 45, 109,
 165, 212, 234, 233, 263

pokok permohonan, 199

political rights, 80

politieke rechten, 80

politik; — hukum, 100; — negara,
 61

positivistik analitis, 48

pragmatisme, 244

Praja patya wiwaha, 129

prediktabilitas, 48

presiden Suharto, 23

preskriptif, 87

principle of fair play, 54

prinsip; — kemanfaatan, 63; —
 persamaan, 56

privat sphere, 242

problematis, 88

Problematika; — sosiologis, 27; —
 teoritis, 26; — yuridis, 27

produk hukum positif, 22

proses; — globalisasi, 71; — peng-
 urusan akte perkawinan, 18;
 — politik, 81; — ritual, 232

public sphere, 242

purusa, 206

putusan pengadilan, 39

R

Radbruch, 50

Raksasa wiwaha, 129

Rancangan Undang-Undang, 11

ras, 79

ratio decinde, 37

realitas ketuhanan, 4

reasoning, 89
recht ide, 82
rechtmatigheid, 58
rechts vacuum, 92
rechts vervijning, 250
rechtsbescherming van de burgers
 tegen de overheid, 86, 105
rechtside, 21
rechtsidee, 60, 85
rechtsonzekerheid, 91
Rechtssicherheit, 102
rechtvaardig, 58
rechtverwijning, 93
rechtvinding, 16
Regeling op de Gemengde Huwelijks,
 13
Reglement op de Gemengde
 Huwelijken, 12
relativisme, 244
religious law, 45
religious marriage ceremony, 120
religious married, 11
rights of man, 80
Roscoe Pound, 52
Rousseau, 72
Rudolph Heimanson, 54
rule of law, 71

S

safety, 68
saldo positif, 63
saling menghormati, 19
same-sex marriages, 221
Sang Maha Pencipta, 1
sanksi ekonomi, 78
Satjipto Rahardjo, 85
Scheltens, 82
secara historis, 46
secara; — *logis*, 40; — *sosio*
 historis, 48
segi etnografis, 157
sejarah, 257
senses communal, 238
should cover, 81
sicherheit des Rechts, 49
sidang MPRS 1968, 78
sistem; — *hukum*, 25, 44, 70; —
 hukum nasional, 33; — *hukum*
 negara, 45; — *nilai*, 68
sociale werkelijkheid, 16
sosial dan spiritual, 156
staatsfundamentalnorm, 85, 99
stabilitas negara, 55
standard setting, 73
stare decisis, 252
state law, 45
state of nature, 73
status agama, 189
statute approach, 36
strong pluralism, 44, 156
struktur dan validitas, 125
stufenbau theory, 98
suami istri, 2, 7
subjek hukum, 114

- substansi; — keadilan, 56; — peraturan perundang-undangan, 22
- suku, 13
- Sumber Bahan Hukum, 38
- sumber hukum, 89
- sustenance*, 68
- syarat formal, 24
- T**
- tanpa dipaksa, 236
- tanpa diskriminasi, 236
- tata hukum, 50
- tataran moral, 68
- Tatsachen, 51
- Tenggang Waktu Pengajuan Pengujian Formil, 198
- teori, 41; — hubungan, 4; — keadilan, 53, 61; — kepastian hukum, 47; — legal pluralisme Griffith, 155; — manfaat (*utilitarianism*), 62; — pembentukan hukum, 87; — perlindungan hukum, 84; — pluralisme, 244; — tentang agama, 34
- Ter Haar, 107
- the Administration of Muslim Law (AMLA)*, 220
- The Family Law Act 1975*, 219
- the greatest happiness*, 63
- The Practical Impact of the Idea of Human Rights*, 80
- the Reformasi*, 216
- the Registry of Muslim Marriages*, 220
- the self disciplined man whose passion are control*, 55
- the supreme virtue of the good state*, 55
- The term 'legal pluralism' refers to the situation*, 109
- The Universal Declaration of Human Rights*, 58
- the Women Charter*, 220
- theo-antroposentris, 238
- theori van rechvaardigheid*, 54
- theory of justice*, 54
- Tindakan radikal, 157
- to attain equality*, 64
- to fulfill and respect*, 200
- to provide abundance*, 64
- to provide security*, 64, 255
- to provide subsistence*, 64
- to serve and to protect*, 105
- Tore Lindholm, 235
- traktat internasional, 235
- transgender, 221
- Triangular Concept of Legal Pluralism*, 46
- tujuan; — hukum, 55; — perkawinan, 3; — politik, 82
- tuntutan; — kemanfaatan, 57; — zaman, 120

U

ukuran kebahagiaan, 63
ulama fikih, 137
Undang-Undang Dasar 1945, 97
Undang-Undang Perkawinan, 7,
8, 11, 17, 25, 101, 111, 117, 171,
257
unifikasi hukum, 33
universal, 2
*Universal Declaration of Human
Rights*, 39, 73, 84, 165
unsur agama, 162
urusan syari'ah, 19
Utilitarianism, 63

V

verijhelds rechten, 80
volksraad, 116

W

warga negara, 13, 25
weak pluralism, 44
wet vacuum, 90, 92
Wilfred Cantwell Smith, 159
Wiwaha, 106, 128

Y

yudikasi, 243
yuridis dogmatik, 55
yurisprudensi, 97
yuristische Geltung, 254

Z

zaman Pencerahan, 75
Zuhairi Misrawi, 160
Zweckmassigkeit, 103

BIODATA PENULIS



Dr. Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc., lahir di Singaraja Bali pada tanggal 7 Februari 1960. Pendidikan SD sampai SMA di Denpasar Bali. S 1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (1979-1984) S2 di Mississippi State University (1995-1997) dan S3 di Program Doktorat Universitas Brawijaya (2014-2017).

Kadek Wiwik Indrayanti mulai mengajar di Fakultas Hukum Unmer Malang mulai tahun 1984 hingga sekarang. Sepulang dari USA beberapa *training* telah diikuti, antara lain di bidang Hak asasi Manusia di Bangkok, Gender di Siemriep Cambodia, Lingkungan dan Gender di Perth Australia dan di Belanda.

Dalam bidang riset lebih banyak ke *empirical studies* karena sesuai dengan mata kuliah yang diemban yakni sosiologi hukum.

Jabatan yang pernah diemban di lingkungan Unmer Malang adalah Kepala Pusat Studi Wanita, Kepala Pusat Lingkungan, sebagai Koordinator kelompok Kerja Lapas Anak Ramah Anak se-Jawa Timur dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Unmer.